

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Umumnya pembangunan ekonomi negara berorientasi pada pertumbuhan (*growth*), yaitu ketika tingkat aktivitas ekonomi suatu negara saat ini melebihi tingkat aktivitas sebelumnya, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi aspek penting yang selalu diperhatikan oleh setiap negara karena menjadi indikator keberhasilan dalam mencapai pembangunan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemajuan ekonomi suatu negara, yang bisa dihitung melalui pendapatan nasional atau *Gross Domestic Product* (GDP) dengan turut menghitung hasil produksi barang dan jasa suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Tingginya pertumbuhan ekonomi mencerminkan semakin baiknya kegiatan pembangunan dan perekonomian pada wilayah negara tersebut. Akibatnya, sangat perlu untuk memahami pertumbuhan ekonomi karena setiap negara berusaha memperbaiki pencapaian tujuan ekonominya sebagai tolak ukur keberhasilan jangka panjangnya. Pertumbuhan ekonomi ialah proses kelanjutan kegiatan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan *output* barang dan jasa masyarakat (Sukirno, 2013).

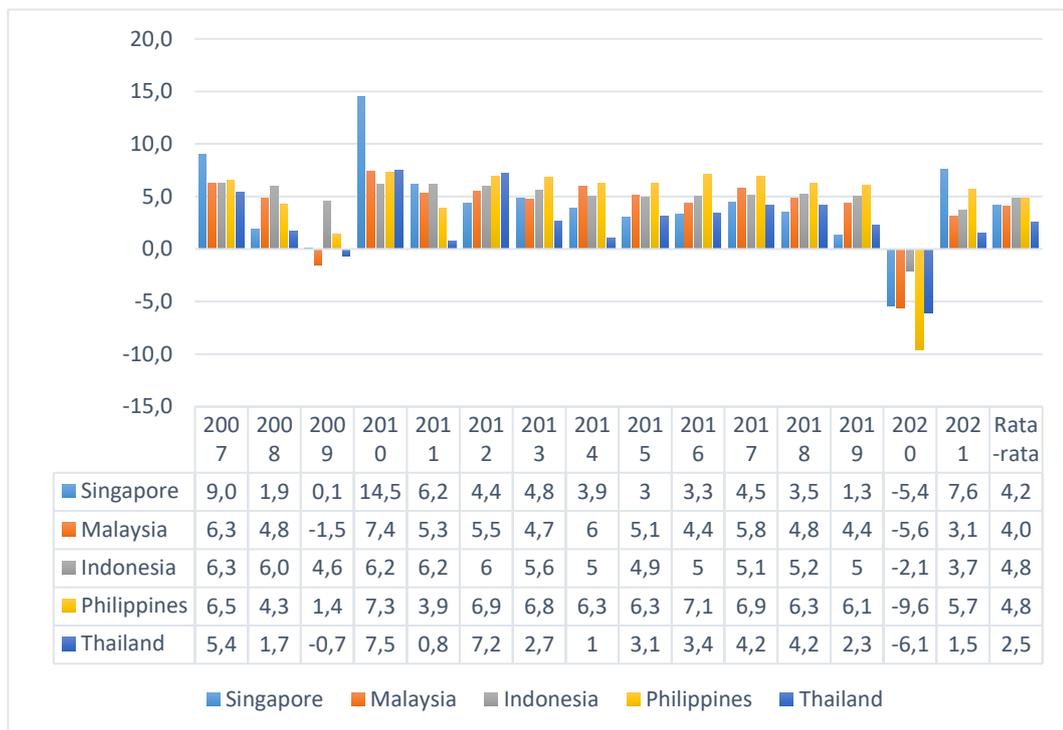
Suatu negara melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan agar meningkatkan pendapatan perkapita yang tertuju pada pemulihan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan *income* akan cepat diperoleh jika angka pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Mulai tahun 2007 hingga 2021, negara-negara di

seluruh dunia bersaing untuk meningkatkan pertumbuhannya masing-masing, tidak terkecuali dengan negara-negara ASEAN. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Thailand sebelumnya telah menjadi fenomena pertumbuhan ekonomi di Asia Timur yang kerap disebut sebagai *The East Asia Miracle* atau pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Negara-negara Asia Timur yang termasuk dalam *High Performing East Asian Economies/HPEs* adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Jepang, Hongkong dan Taiwan.

Beberapa negara ASEAN merupakan kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Meskipun begitu, korupsi masih menjadi persoalan serius di negara-negara ASEAN. Kemajuan ekonomi suatu negara diduga dipengaruhi oleh tingkat korupsi yang ada. Korupsi yakni fakta yang tidak bisa dihindari lagi keberadaannya diberbagai Negara, termasuk negara-negara ASEAN. Baik di negara berkembang atau negara maju korupsi merupakan fenomena global yang meluas dari suatu transaksi pembayaran illegal yang menjadi masalah di setiap negara.

Kerugian besar di berbagai sektor dipicu oleh adanya korupsi, selain itu juga dapat menggerogoti kinerja ekonomi. Menurut *World Bank*, korupsi merupakan "*The abuse of public power of private benefit*" yaitu manipulasi kekuatan publik untuk relevansi pribadi. Berdasarkan laporan *World Bank* dalam Sri Nawatmi, memprediksi bahwa kerugian lebih dari US\$10 Miliar atau sekitar 5% dari *Gross Domestic Product* (GDP) disebabkan korupsi setiap tahun. Berdasarkan *United States Agency for International Development* (USAID)

dalam Sri Nawatmi menulis bahwa dalam tindakan korupsi sendiri dapat merusak dan membuat tidak berjalannya pembangunan ekonomi dan sektor swasta juga akan menambah biaya bisnisnya karena kasus suap kepada pejabat pemerintah dan biaya penutupan risiko pelanggaran kesepakatan agar terhindar dari jerat hukum (Nawatmi, 2016).



Sumber: World Bank (2021), data diolah

### Grafik 1. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Lima Negara ASEAN Tahun 2007-2021

Grafik 1.1 memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi GDP lima negara ASEAN yaitu Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines dan Thailand pada tahun 2007-2021, dimana laju pertumbuhan GDP dipakai untuk indikator pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan status ekonomi suatu negara. Selama kurun waktu tersebut, Indonesia dan Philippines menjadi negara

pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan rata-rata sebesar 4,88%. Kemudian diikuti oleh Singapore dengan laju rata-rata pertumbuhan ekonomi 4,2% dan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi 4,0% oleh Malaysia. Sementara negara Thailand memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata terendah sebesar 2,5%. Ditahun 2019, terjadi penurunan di Thailand akibat perang dagang.

Dapat dilihat pula di tahun 2020 lima negara ASEAN tersebut mengalami kemerosotan ekonomi dimana pertumbuhan ekonominya berada dibawah 0 persen (minus) yaitu, Singapore mencapai -5,4%, Malaysia mencapai -5,6%, Indonesia mencapai -2,1%, Philippines dengan penurunan ekonomi tertinggi mencapai -9,6% dan Thailand mencapai -6,1%. Angka tersebut menempatkan negara ASEAN pada posisi yang dapat mengurangi dampak karena pandemi Covid-19 bagi ekonomi ke level moderat. Gabungan kelembagaan fiskal, moneter dan sektoral yang kuat memungkinkan untuk meminimalkan dampak risiko global terhadap perekonomian domestik. Risiko ini memiliki implikasi ekonomi makro di negara-negara yang terkena dampak pandemi (Kemenkeu, 2021).

Berbagai faktor dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Salah satu aspek yang diyakini berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara adalah tingkat korupsi. Negara Asia Tenggara sebagian merupakan negara berkembang dan lebih rentan terhadap praktik korupsi daripada negara maju (Akman & Sapha A.H, 2018). Korupsi merupakan fenomena sukar dan multidimensi sebab akibat, kerana itu mengambil banyak bentuk dan fungsi dalam situasi yang berbeda. Adanya korupsi bisa memicu

defisit yang besar di berbagai sektor, selain itu juga dapat menggerogoti kinerja ekonomi.

Negara ASEAN memiliki sejarah yang panjang dalam hal korupsi, dimana korupsi dianggap sebagai salah satu masalah utama yang perlu diatasi. Korupsi telah terjadi di semua sektor dalam sistem pemerintahan, termasuk di bidang keuangan, perbankan, dan lembaga pemerintah lainnya. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia dan Philipinnes menjadi negara teratas dalam daftar negara yang menderita tingkat korupsi yang tinggi.

Korupsi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang menjadi salah satu isu global. “*Grease of the Wheels*” dan “*Sand of the Wheels*” merupakan dua perspektif yang berbeda mengenai tindakan korupsi. Pendorong pertumbuhan atau *grease of the wheels* dianggap jika korupsi memiliki dampak positif pada perekonomian, sebaliknya korupsi disebut sebagai *sand of the wheels* jika korupsi menjadi penghambat ekonomi.

Pada beberapa kasus, antara pertumbuhan ekonomi dan korupsi memiliki hubungan. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan membatasi upaya reformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Korupsi dapat memberikan keuntungan yang tidak pantas bagi kelompok kepentingan tertentu, memperburuk ketimpangan distribusi pendapatan dan akhirnya merusak aktivitas perdagangan dan menghambat investasi.

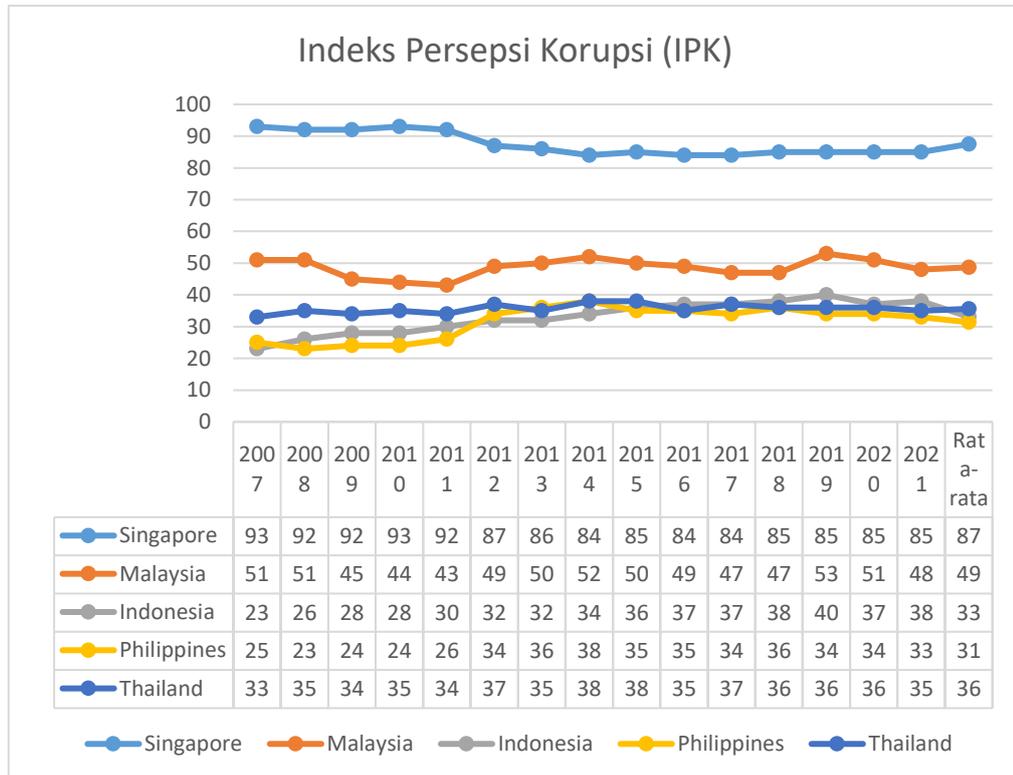
Dalam melihat kaitan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi, tokoh sejarawan dan politisi pada umumnya telah lama memperdebatkan ancaman korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pandangan yang sangat global adalah

bahwa korupsi dapat mengganggu aturan mekanisme sumber daya yang efektif pada perekonomian. Beberapa berpendapat bahwa korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Korupsi dapat menyebabkan perangkap kemiskinan dan inefisiensi layanan publik karena penyalahgunaan anggaran publik, dimana dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur atau meningkatkan pelayanan publik malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, proyek-proyek pembangunan tertunda atau tidak selesai sehingga menyebabkan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Menurut Pellegrini dan Gerlagh (2004) dalam Happy Febrina Hariyani menemukan bukti mengenai implikasi dari korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, semua studi empiris mengungkapkan tindakan korupsi secara signifikan mengurangi pertumbuhan ekonomi (Hariyani et al., 2016).

Tidak ada negara yang seutuhnya bersih dari tindakan korupsi yang diungkapkan pada laporan *Corruption Perception Index* “*Not one single country, anywhere in the world is corruption free*”. Yang membedakan hanyalah banyaknya dari tingkat korupsi pada masing-masing negara (Transparency International, 2015).

Indeks Persepsi Korupsi menjadi salah satu parameter yang dipakai dalam memperkirakan tindakan korupsi yang dipublikasikan oleh *Transparency International*. Indeks persepsi korupsi menggunakan skala skor, dimana skor 0 menjelaskan sangat korup negara tersebut dan skor 100 menjelaskan sangat bersih dari korup negara tersebut. Beberapa negara ASEAN telah membuat langkah-langkah dalam pemberantasan korupsi melalui program reformasi dan

perbaikan sistem hukum di negara tersebut. Beberapa tindakan tersebut antara lain, pembuatan UU anti-korupsi, pelaksanaan program reformasi di instansi pemerintah, dan transparansi anggaran.



Sumber: *Transparency International (2021), data diolah*

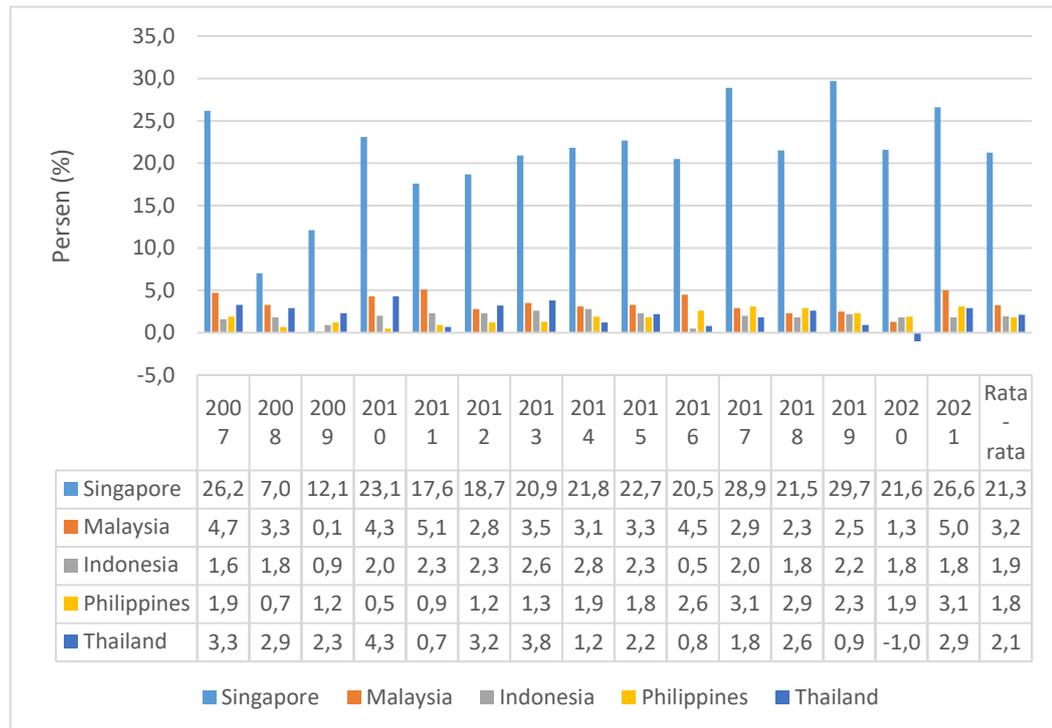
**Grafik 1. 2**  
**Indeks Persepsi Korupsi Lima Negara ASEAN Tahun 2007-2021**

Terlihat bahwa selama 15 tahun tersebut terdapat kecenderungan kenaikan angka IPK pada lima negara ASEAN walaupun angkanya kadang mengalami fluktuasi. IPK menggunakan skor 0 sampai 100, dengan nilai 0 menandakan bahwa sangat korup negara tersebut sementara nilai 100 menandakan bahwa sangat bersih negara tersebut dari korupsi. Berdasarkan grafik 1.2 menunjukkan bahwa hanya negara Singapore dan Malaysia yang memiliki skor IPK di atas 50 dari 100. Hal ini disebabkan karena institusi

publik di banyak negara Asia Tenggara kurang transparansi dan akuntabilitas, kontribusi masyarakat sipil dibatasi serta tidak terdapat undang-undang anti-korupsi (Transparency International, 2015). Singapore merupakan negara yang paling bersih dari praktik korupsi dengan rata-rata skor IPK sebesar 87. Sedangkan negara yang sangat korup diantara lima negara ASEAN tersebut adalah Philippines dengan rata-rata skor IPK sebesar 31.

Setiap tahunnya kasus korupsi masih marak berjalan di negara-negara ASEAN karena Indeks Persepsi Korupsi yang rendah. Hal ini menimbulkan perhatian dan akan mengkhawatirkan apabila tidak ada kebijakan yang diambil untuk pengendalian korupsi. Tingkat korupsi yang tinggi sangat mempengaruhi kondisi ekonomi dengan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Selain korupsi terdapat faktor penting lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu *Foreign Direct Investment* (FDI) atau investasi asing langsung. Pada negara ASEAN, pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peran FDI. ASEAN mempunyai keterbukaan dalam mengembangkan ekonominya dengan menerima FDI untuk membangun ekonomi negara masing-masing. FDI menjadi salah satu bentuk modal tambahan atau investasi yang banyak dicari oleh negara-negara berkembang seperti di Asia Tenggara karena rendahnya dalam hal tabungan dan investasi.



Sumber: World Bank (2021), data diolah

### Grafik 1. 3 Foreign Direct Investment Lima Negara ASEAN Tahun 2007-2021

Grafik 1.3 menunjukkan data *foreign direct investmen* lima negara ASEAN tahun 2007-2021 yang diperoleh dari World Bank. *Foreign direct investment* digunakan untuk melihat masuknya arus investasi asing ke suatu negara dengan komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi. Seperti terlihat pada grafik, penerimaan FDI Singapore lebih tinggi dibandingkan negara lain meskipun angkanya berfluktuasi. Lebih dari 20% penerimaan FDI dari tahun 2007 hingga 2021. Hal ini karena iklim usaha di Singapore. Fasilitas dan kemudahan lain yang dialokasikan negara kepada investor akan banyak menarik penanaman modal dan menjadikan negara ini sangat bersaing dalam hal menarik investasi. Banyak dana disimpan di Singapore untuk alasan

keamanan dan situasi politik yang cenderung stabil. Sementara peringkat terakhir ditempati oleh Philipinnes dengan mean yaitu 1,8%. Hal tersebut dikarenakan regulasi yang tidak baik, birokrasi yang rumit, korupsi, dan infrastruktur yang kurang berkembang, sehingga membuat beberapa investor enggan untuk berinvestasi di Philipinnes

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi aspek lainnya yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam pengukuran kualitas manusia, *United Nations Development Program* (UNDP) memperkenalkan konsepsi mutu modal manusia yaitu *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingginya kualitas pembangunan manusia dapat dengan kuat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memaksimalkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik dari segi teknologi ataupun kelembagaan sebagai alat utama pencapaian pertumbuhan ekonomi (Dewi & Sutrisna, 2014). Rentang skor IPM adalah 0-100. Ketika skor IPM semakin mendekati 100, kualitas sumber daya manusia di negara tersebut semakin tinggi.

Supaya terbentuk pemerataan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM masyarakatnya, di wilayah ASEAN harus menghilangkan ketidakseimbangan suatu pembangunan dan kesejahteraan. Terutama semenjak berlangsungnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), setiap negara-negara ASEAN supaya bisa memadankan kualitas sumber daya manusianya karena merupakan modal awal suatu pembangunan.

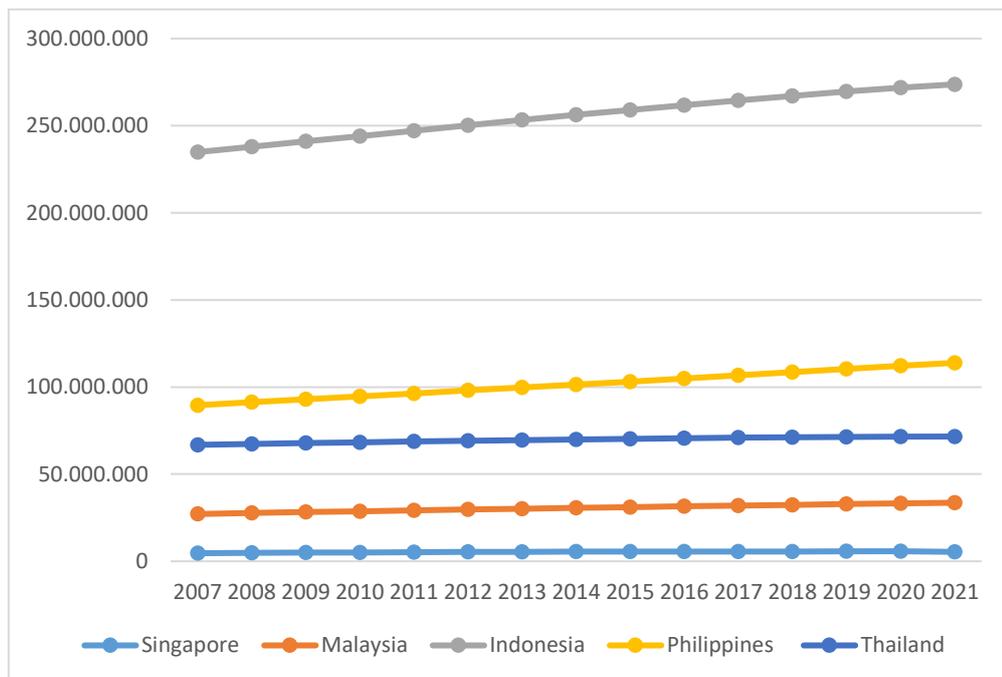


Sumber: Human Development Report (2021), data diolah

#### **Grafik 1. 4** **Indeks Pembangunan Manusia Lima Negara ASEAN Tahun 2007-2021**

Adanya kenaikan IPM bisa menguatkan peningkatan pendapatan dan output dimasa yang akan datang, sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Terlihat pada grafik 1.4 memaparkan data IPM lima negara ASEAN. IPM kriteria sangat tinggi ( $IPM \geq 80$ ) pada tahun 2021 dimiliki oleh negara Singapore, Malaysia dan Thailand. Hal ini dikarenakan ketiga negara tersebut menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan mereka dan adanya penerapan kebijakan pro-rakyat, termasuk program kesehatan dan perlindungan sosial yang luas. Disusul dengan Indonesia yang masuk dalam kriteria tinggi (IPM 70-79), hal ini dikarenakan

saat ini Indonesia telah berhasil meningkatkan tingkat literasi dan angka partisipasi pendidikan serta meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperbaiki kurikulum dan teknologi pendidikan. Sedangkan kondisi di Philipinnes masuk pada kriteria sedang (IPM 61-69), hal ini dikarenakan adanya ketimpangan ekonomi. Meskipun ekonomi Philipinnes telah tumbuh dengan laju yang tinggi, namun ketimpangan pendapatan masih sangat terasa. Tingginya tingkat korupsi memperburuk situasi sosial dan ekonomi, hal ini menghambat pembangunan manusia di negara tersebut.



Sumber: World Bank (2021), data diolah

**Grafik 1. 5**  
**Jumlah Penduduk Lima Negara ASEAN Tahun 2007-2021**

Grafik 1.5 merupakan jumlah penduduk lima negara ASEAN. Seperti terlihat pada grafik, jumlah penduduk yang ada di Negara ASEAN mengalami peningkatan selama kurun waktu 2007-2021. Jumlah penduduk terendah

terdapat pada Negara Singapore di tahun 2007 dengan jumlah penduduk 4.588.599 juta jiwa, sementara jumlah penduduk tertinggi terdapat di Negara Indonesia dengan penduduk 273.753.191 juta jiwa di tahun 2021. Populasi suatu negara merupakan subjek dari pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. J.S.Mills dalam teori klasik mengungkapkan bahwa pertumbuhan populasi akan meningkatkan permintaan dan pertumbuhan ekonomi karena bertambahnya output yang dihasilkan (Rochaida, 2016). Positif atau pun negatif jumlah penduduk maka pembangunan ekonomi bergantung dengan kemampuan sistem perekonomian untuk menyerap secara produktif serta penambahan tenaga kerja tersebut dapat dimanfaatkan dan peningkatan kualitas pendidikan harus juga diimbangi dengan pemerataannya (Todaro, 2004).

Dari beberapa data yang terkait Pertumbuhan ekonomi, IPK, FDI, IPM, serta jumlah penduduk itu makin terlihat bahwasanya lima negara ASEAN tidak semuanya memiliki perekonomian yang stabil. Kondisi yang terjadi pada Philippines memicu munculnya pertanyaan, mengapa negara yang memiliki angka korupsi tertinggi memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi pula dari kelima negara ASEAN tersebut.

Negara-negara di ASEAN memiliki keadaan ekonomi yang bervariasi dan tingkat kemampuan ekonomi yang berbeda pula di tiap negaranya, seperti dijelaskan sebelumnya. Fokus penelitian ini yaitu, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philipinnes, dan Thailand sebagai lima Negara ASEAN. Perihal ini diakibatkan oleh fakta bahwa lima negara dengan PDB terbesar di ASEAN

yang bisa mewakili data kelompok pendapatan IMF di kawasan ASEAN. Sebab Indonesia dan Philippines tercantum dalam kelompok pendapatan PDB yang mewakili pendapatan menengah ke bawah sementara kategori PDB pendapatan menengah yaitu Malaysia dan Thailand. Sementara Singapore menjadi kategori PDB pendapatan menengah atas.

Adapun korupsi dianggap sebagai masalah serius yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Setiap negara di ASEAN memiliki tingkat korupsi yang berbeda-beda. Beberapa negara menghadapi tingkat korupsi yang rendah, sementara yang lain memiliki tingkat korupsi yang sangat tinggi apalagi yang berada di negara yang masih berkembang. Maka menjadi menarik untuk penulis melihat bagaimana hubungan antara Korupsi, FDI, IPM, dan Jumlah penduduk dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN berpengaruh positif untuk pertumbuhan atau berpengaruh negative untuk pertumbuhan perekonomian negara. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KORUPSI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI : KAJIAN EMPIRIK NEGARA ASEAN”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN tahun 2007-2021?
2. Bagaimana pengaruh Foreign Direct Investment terhadap pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN tahun 2007-2021?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN tahun 2007-2021?
4. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN tahun 2007-2021?

## **C. BATASAN MASALAH**

Dalam penelitian ini dibatasi masalah-masalah yang menjadi cakupannya, antara lain:

1. Periode penelitian yaitu 15 tahun dari tahun 2007-2021
2. Sampel yang digunakan adalah 5 negara ASEAN karena keterbatasan data
3. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Indeks Persepsi Korupsi, Foreign Direct Investment, Indeks Pembangunan Manusia, dan Jumlah Penduduk.

## **D. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi lima negara ASEAN dipengaruhi oleh Korupsi
2. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi lima negara ASEAN dipengaruhi oleh Foreign Direct Investment
3. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi lima negara ASEAN dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusi
4. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi lima negara ASEAN dipengaruhi oleh Jumlah Penduduk

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis untuk mengetahui dan memperluas wawasan melalui pengaruh indeks persepsi korupsi, FDI, IPM, dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bagi pengambil kebijakan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah korupsi, FDI, IPM, dan jumlah penduduk dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat memperbanyak literature dan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi, khususnya dalam pengembangan kajian terkait korupsi dan pertumbuhan ekonomi.